

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: 168.246 KK di Kab. Bandung Terima BPNT
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Bandung
Sumber / Hal	: Galamedia/ Hal. 4
Edisi	: Rabu, 16 Mei 2018

## 168.246 KK di Kab. Bandung Terima BPNT

### KUTAWARINGIN, (GM).-

Sebanyak 168.246 kepala keluarga (KK) se-Kab. Bandung, menerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dari pemerintah yang merupakan transformasi dari bantuan beras sejahtera (rastra).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Bandung, Sofian Nataprawira mengatakan, pelaksanaan penyaluran BPNT di wilayahnya harus berjalan dengan baik. Sebab itulah perlu dikawal para camat, perangkat daerah dan desa. Sehingga akan tercapai indikator 6 T yakni tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah dan mutu, serta tepat waktu dan tepat administrasi.

"Berdasarkan pendataan jumlah KPM (Kelompok Penerima Man-

faat) 2017, sebanyak 168.246 KK menerima BPNT. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan data KPM 2016, yakni sebanyak 186.240 KK. Hal ini menunjukkan masyarakat Kab. Bandung secara perlahan telah keluar dari kemiskinan," ungkap Sofian usai *launching* BPNT di Kantor Desa Cibodas, Kec. Kutawaringin, Senin (14/5).

Sofian mengimbau dalam pendistribusian BPNT, petugas jangan sampai membuat kesalahan. Hal itu seringkali terjadi ketika ada harga murah, penyalurannya tidak tepat sasaran.

"Orang yang tidak berhak, jangan sampai mendapatkan rastra. Pokoknya, jangan ada pemikiran asal lancar dalam penyetoran ke Bulog.

Ini harus lebih dicermati, terkait validasi data masyarakat yang membutuhkan," imbuhnya.

### Bertahap

Sementara Kepala Dinas Sosial Kab. Bandung, Nina Setiana menerangkan, kartu BPNT yang diterima para KPM tersebut dapat dibelanjakan beras dan telur yang bisa didapatkan di BUMDes setempat atau di warung-warung yang telah ditunjuk.

"Untuk mengurangi beban masyarakat, program Rastra bertransformasi menjadi BPNT. Bantuan ini diperuntukan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, khususnya untuk mendorong inklusi ekonomi. Dengan non-tunai jadi lebih utuh, transparan, efektif, dan

lebih aman," tuturnya.

Nina menyebutkan, setiap tanggal 20, KPM akan ditransfer sebesar Rp 110.000/KK melalui BNI yang ditunjuk pemerintah. Penyaluran BPNT akan dilakukan secara bertahap, dan nantinya bisa ditukarkan dengan komoditi beras dan telur di kios atau *E-Waroeng* yang dikelola BUMDes di Kab. Bandung.

Ditambahkan, BPNT bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Sehingga selain terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat, juga kebutuhan gizi tercukupi.

Melalui hadirnya Puskesos, Nina berharap pelaksanaan penyaluran BPNT akan berindikasi pada 6 T yang disampaikan sekda. (B.122)\*\*